



PEMERINTAH PROVINSI BALI

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)**

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

TAHUN 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

| | | | |
|---------|---|---|----|
| BAB I | : | PENDAHULUAN | 1 |
| | | 1.1. LATAR BELAKANG | 1 |
| | | 1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI | 1 |
| BAB II | : | PERJANJIAN KINERJA | 4 |
| | | 2.1 TELAAH VISI MISI PEMERINTAH PROVINSI BALI | 4 |
| | | 2.2 VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI | 22 |
| | | 2.3. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN | 23 |
| | | 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA | 25 |
| | | 2.5 PENETAPAN KINERJA | 25 |
| BAB III | : | AKUNTABILITAS KINERJA | 26 |
| | | 3.1 EVALUASI KINERJA | 26 |
| | | 3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA | 26 |
| | | 3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA | 28 |
| | | 3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN TAHUN 2018 DENGAN TARGET RENSTRA | 28 |
| | | 3.5 ASPEK PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT | 29 |
| | | 3.6 REALISASI ANGGARAN | 31 |
| BAB IV | : | PENUTUP | 35 |

LAMPIRAN

1. RENCANA STRATEGIS
2. RENCANA KERJA TAHUNAN 2019
3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019
4. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2019
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA
6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
7. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| TABEL 1 : VISI MISI TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI PROVINSI BALI TAHUN 2019 - 2023 | 4 |
| TABEL 2 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI BALI TAHUN 2019 – 2023 | 14 |
| TABEL 3 : PENETAPAN KINERJA | 25 |
| TABEL 4 : CAPAIAN SASARAN | 27 |
| TABEL 5 : PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA | 28 |
| TABEL 6 : PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2019 DENGAN TARGET RENSTRA | 29 |
| TABEL 7 : KUANTITAS SDM | 29 |
| TABEL 8 : REALISASI PENDAPATAN | 32 |
| TABEL 9 : REALISASI BELANJA DAERAH | 33 |
| TABEL 10 : REALISASI BELANJA LANGSUNG | 33 |

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Provinsi Bali disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu disusunlah LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019.

Tujuan dari penyusunan LKjIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Badan Penghubung Provinsi Bali serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2019.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 31 Desember 2019

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI



IGUSTI NGURAH WIBAWA.S.Sos, M.Si
PEMBINA
NIP. 19631215 198903 1 015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

Dalam LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali disajikan penjelasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang dipakai pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) dari kegiatan Tahun 2019. Sedangkan manfaat (benefit) belum dapat diukur karena memerlukan waktu lama untuk dilakukan penelitian.

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan belanja langsung sesuai dengan yang tertuang dalam DPA Tahun 2019 secara kuantitatif mencapai angka capaian 98,55% atau secara kualitatif termasuk kategori baik. Pencapaian kinerja ini didorong adanya kerja sama yang baik dari seluruh aparatur yang ada di Badan Penghubung Provinsi Bali, serta adanya kesungguhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Jakarta, 2019

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Sejalan dengan meningkatnya urusan-urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali di Jakarta baik yang meliputi urusan administratif, teknis maupun koordinatif, peran dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali di Ibu Kota Negara Jakarta semakin strategis dalam memberikan pelayanan terhadap kelancaran penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintah Daerah baik internal maupun eksternal. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja yang telah berjalan maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja.

Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan itu Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pembuatan LkjIP ini mempunyai manfaat sangat penting disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan taktis strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) selama satu tahun anggaran. Sasaran penyusunan LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019.

I. 2 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Penghubung mempunyai tugas untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Sesuai dengan Tugas Badan Penghubung secara garis besar memberikan pelayanan sebagai berikut:

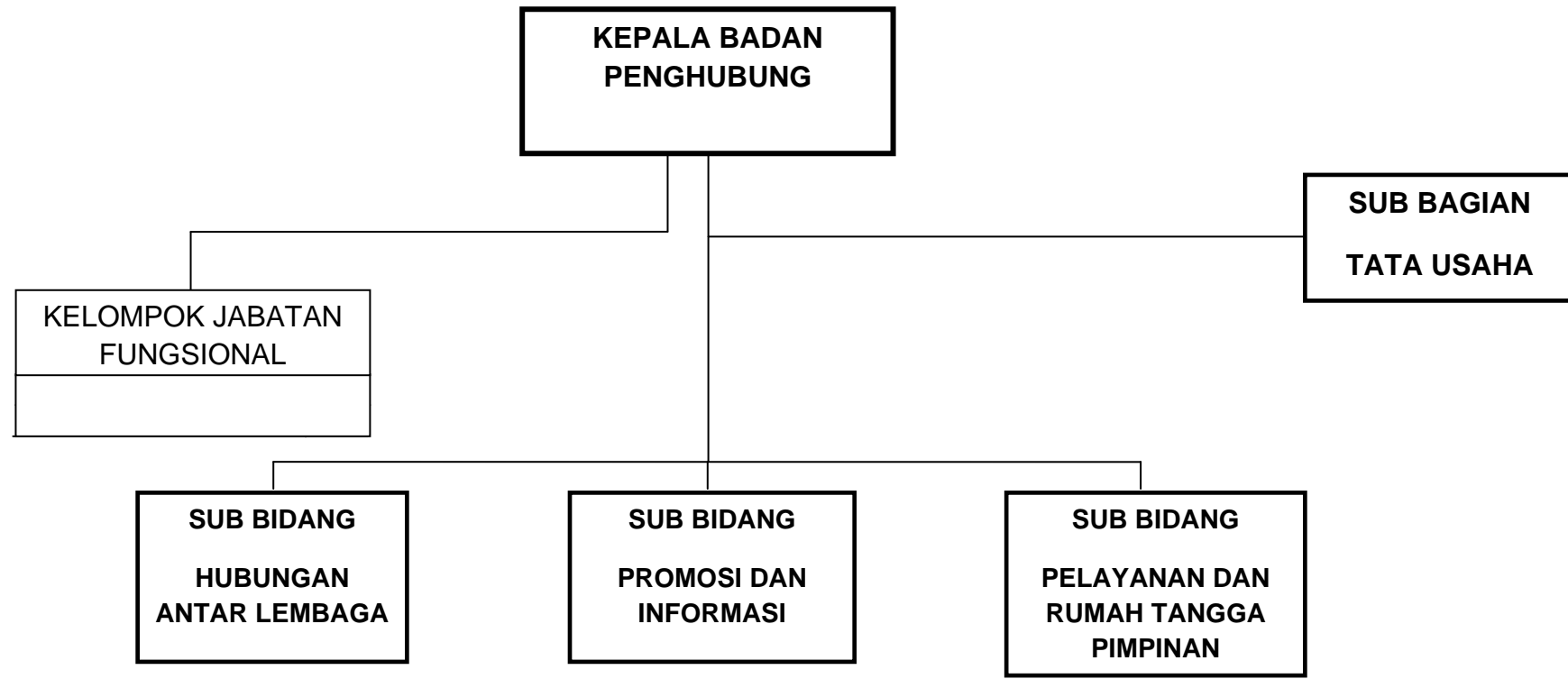
1. Mempermudah koordinasi pemerintah daerah ke pusat;
2. Memberikan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta;
3. Melayani pimpinan daerah yang melaksanakan dinas ke Ibu Kota Jakarta;
4. Sebagai sarana promosi dan informasi seni, budaya dan pariwisata Bali di Jakarta;
5. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan dari Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali.

Fungsi, Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai empat fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
2. Pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas Badan.
3. Pelaksanaan urusan Tata Usaha; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Bali terdiri dari :

1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
4. Sub Bidang Promosi dan Informasi
5. Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB II
PERJANJIAN KINERJA

2.1 TELAAH VISI MISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2019-2023. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Bali 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali
Tahun 2019-2023**

**VISI: “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” MELALUI POLA PEMBANGUNAN
SEMESTA BERENCANA**

| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI | |
|---|----------------------|---|-----------------|---|
| MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI | | | | |
| Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak | 1 | Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali | 1 | Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan |

| | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|---|
| | | | 2 | Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat |
| | 2 | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin | 1 | Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali |
| | | | 2 | Peningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat masih menggunakan produk sandang Bali |
| | 3 | Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni | 1 | Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali |
| | | | 2 | Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali |
| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI | |
| | 4 | Terkendalnya Stabilitas Harga Pangan | 1 | Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan |
| | | | 2 | Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali |
| MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI | | | | |
| Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian | 1 | Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan local | 1 | Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan |
| | | | 2 | Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi |

| | | | | |
|---|----------------------|--|-----------------|--|
| | | | | lahan pertanian sawah di Provinsi Bali |
| | | | 3 | Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor |
| | 2 | Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali | 1 | Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor |
| | | | 2 | Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas |
| | 3 | Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali | 1 | Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian |
| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI | |
| MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN. | | | | |
| Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali | 1 | Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali | 1 | Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali |
| | 2 | Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali | | |
| | 3 | Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat | 2 | Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS) |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDINYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN | | | | |
| Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas | 1 | Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas | 1 | Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas |
| | 2 | Terwujudnya wajib belajar 12 tahun | 2 | Pendidikan gratis 12 tahun |
| MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT | | | | |
| Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal | Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman | | Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional | |
| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI | |
| MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI | | | | |
| Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi | Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali | | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Entrepreneur | |
| MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA | | | | |
| Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali | Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali | | Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI | | | |
| Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing | 1 | Meningkatnya kompetensi tenaga kerja | Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global |
| | 2 | Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri | |
| MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI | | | |
| Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan | Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan | | Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan |
| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI |
| MISI 10. MEMAJUKAN KEBUDAYAAN BALI MELALUI PENINGKATAN PELINDUNGAN, PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN NILAI-NILAI ADAT, AGAMA, TRADISI, SENI, DAN BUDAYA KRAMA BALI | | | |
| Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali | Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali. | 1 | Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal |
| | | 2 | Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali |
| | | 3 | Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan |
| | | 4 | Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | | |
| MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH | | | | |
| Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi | Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi | 1 | Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura | |
| | | 2 | Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama. | |
| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | STRATEGI | | |
| MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN | | | | |
| Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi | Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak | | Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak | |
| MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI | | | | |
| Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas | 1 | Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas | 1 | Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata |
| | 2 | Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali | 2 | Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi |
| MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|--|
| Meningkatnya pasar pariwisata Bali | | Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global | | Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali |
| MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF | | | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan | 1 | Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan | 1 | Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata |
| | 2 | Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata | 1 | Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan sesuai pasar kerja |
| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI | |
| | | | 2 | Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pariwisata |
| MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK Mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas | | | | |
| Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali | 1 | Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali | 1 | Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali |
| | 2 | Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal | 1 | Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal |
| MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK | | | | |

| MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI | | | | |
|---|--|---|-----------------|---|
| Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali | 1 | Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor | 1 | Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor |
| | 2 | Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali | 2 | Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor |
| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | | STRATEGI | |
| | | | 3 | Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor |
| MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK Mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali | | | | |
| Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur | Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi | | 1 | Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru | | | 2 | Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan public |
| MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN | | | | |
| Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan | 1 | Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya. | 1 | Pemberdayaan Krama Bali dan aparat pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman |
| | 2 | Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan | 2 | Peningkatan koordinasi antara aparat pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata |

| MISI/TUJUAN | SASARAN RPJMD | STRATEGI | | |
|--|---|----------|---|--|
| MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI | | | | |
| Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali | Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis | 1 | Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali | |
| | | 2 | Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali | |
| MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH | | | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis | Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan | 1 | Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali |
| Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah | Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan | 2 | Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman |
| MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH | | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik | Meningkatnya kualitas pelayanan sektor public | 1 | Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah |
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan | 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik | 1 | Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi |
| | 2 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah | 1 | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan lain-lain |

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel. 2

**Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali
Tahun 2019-2023**

| Strategi | | Arah Kebijakan | |
|-----------------|---|---|--|
| 1 | Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan | Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bali" | |
| 2 | Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat | Meningkatkan keamanan dan konsumsi pangan bergizi | |
| 3 | Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali | Stabilitas harga pangan Krama Bali | |
| 4 | Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krama Bali | "Yadnya Dharma Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) menjadi jaringan pusat penyediaan sandang gratis atau murah dan layak pakai Krama Bali di kab/kota Provinsi Bali | |
| 5 | Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin menggunakan produk sandang | Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin | |
| 6 | Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali | Meningkatkan kepemilikan rumah bagi rumah tangga Krama Bali | |
| 7 | Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali | Menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu bank/sumber pendanaan bunga rendah untuk kredit rumah layak huni Krama Bali golongan ekonomi lemah (atau kelompok tertentu yang lebih tepat) | |
| Strategi | | Arah Kebijakan | |
| 8 | Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan | 1 | Pengenalan dan penerapan teknologi kepada petani pelaku usaha tanaman pangan dalam arti luas, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan produksi |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| | | 2 | Modernisasi sistem tanaman pertanian hortikultura untuk meningkatkan hasil tanam serta menghasilkan keluaran yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi |
| 9 | Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah Provinsi Bali | Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/lembaga/organisasi Subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah kab/kota Provinsi Bali | |
| 10 | Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor | 1 | Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah/swasta atau perguruan tinggi untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor |
| | | 2 | Pelindungan lahan pertanian pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan berkelanjutan |
| 11 | Pengembangan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor | Pembinaan dan pengendalian petani untuk menghasilkan produk hasil pertaniannya sesuai dengan Standar Kualitas Minimal (SKM) untuk memenuhi kualitas pasar lokal dan ekspor | |
| 12 | Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas | Pengembangan kompetensi Krama Bali dibidang pertanian tanaman pangan, agro industri, pascapanen sebagai duta pengembangan masyarakat pertanian yang unggul dan berkelanjutan | |
| 13 | Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian | 1 | Meningkatkan kemampuan petani dengan mengenalkan industri pangan olahan hasil pertanian |
| | | 2 | Membantu meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor produk hasil pertanian dalam arti luas |
| | | 3 | Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani |
| Strategi | | Arah Kebijakan | |
| 14 | Pendataan riwayat dan | Mengembangkan sistem data base | |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | elayanan kesehatan Krama Bali | riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali | |
| 15 | Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS) | Membangun sistem data base peserta jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan Krama Bali pendataan Krama Bali terintegrasi riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali | |
| 16 | Menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas | 1 | Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi Bali diatas Nasional |
| | | 2 | Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga pendidik |
| 17 | Pendidikan gratis 12 tahun | Memberikan beasiswa bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan Sejahtera -II untuk bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Provinsi Bali | |
| 18 | Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional | Membangun sistem manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu untuk diajukan ke pemerintah pusat | |
| 19 | Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Entrepreneur | 1 | Membangun sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali berjiwa wirausahawan |
| | | 2 | Membangun hubungan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk menghasilkan wirausaha-2 baru Krama Bali |
| | | 3 | Membangun hubungan kerjasama antara Government ToGovernment (G To G) dan pemerintah dengan swasta penempatan/ penyaluran dan perlindungan Tenaga Kerja Kerama Bali di luar negeri |
| 20 | Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali | 1 | Mengembangkan Jaminan Sosial Kesehatan/ BPJS Kesehatan Provinsi Bali |
| | | 2 | Memberdayakan sistem gotong royong sosial kemasyarakatan yang telah ada dan hidup pada |

| | | | |
|-----------------|--|---|---|
| | | | Krama Bali |
| Strategi | | Arah Kebijakan | |
| | | 3 | Meningkatkan jaminan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin) |
| 21 | Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global | Membangun sistem, sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali unggul dan meningkatkan kesempatan kerja | |
| 22 | Meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan | 1 | Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali |
| | | 2 | Membangun hubungan kerjasama antara Government To Government (G To G) dan pemerintah dengan swasta pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan Krama Bali bekerja diluar negeri |
| 23 | Melembagakan dan menginternalisasi nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal | Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali guna memperkokoh jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali | |
| 24 | Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali | Pengembangan tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi | |
| 25 | Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan | Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, dan karya Seni, Sastra, dan Budaya | |
| 26 | Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya | Melindungi peninggalan benda cagar budaya secara holistik | |
| 27 | Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura | 1 | Meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan |
| | | 2 | Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku |
| | | 3 | Meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu |
| | | 4 | Pengamanan dan perlindungan |

| | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|
| | | | terhadap Pura dan Pratima Pura |
| | | 5 | Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya |
| Strategi | | Arah Kebijakan | |
| | | 6 | Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbol simbol keagamaan) |
| 28 | Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama | Meningkatkan toleransi hidup beragama | |
| 29 | Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak | 1 | Memperkuat Desa Adat dalam melaksanakan fungsi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, serta awig-awig dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa |
| | | 2 | Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non-formal) |
| | | 3 | Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni (generasi muda) |
| | | 4 | Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Moderen |
| | | 5 | Memperkuat dan memberdayakan organisasi sekaha teruna dan pecalang di Desa Adat sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi |
| | | 6 | Memperkuat Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| | | | nilai-nilai Sad Kerthi |
| | | 7 | Menjadikan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya |
| | | 8 | Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat/Awig/Perarem di Desa Adat |
| | | 9 | Memberi perlindungan terhadap aset Desa (milik/Druwe Desa) |
| Strategi | | Arah Kebijakan | |
| | | 10 | Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali |
| 30 | Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata | Memberdayakan Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya mempunyai nilai ekonomis | |
| 31 | Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi | Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah | |
| 32 | Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali | Mempromosikan distinasasi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali | |
| 33 | Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata | Pengendalian pelaku usaha industri pariwisata melalui pemenuhan Standar minimal (SPM) Pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali | |
| 34 | Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sesuai pasar kerja | 1 | Melakukan moratorium mengalihkan investasi dalam jumlah tertentu (atau size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara |
| | | 2 | Kemudahan perijinan usaha untuk investasi di Bali Timur dan Utara (size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara |

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|---|
| | | 3 | Pengembangan sumberdaya daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta |
| 35 | Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenaga kerjaan disektor pariwisata | | Membangun sarana prasarana untuk terbangunnya persepsi brand Bali untuk seluruh produk hasil produksi Provinsi Bali |
| Strategi | | Arah Kebijakan | |
| 36 | Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor | 1 | Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk yang unik dan berbasis budaya Bali yang berdaya saing tinggi |
| | | 2 | Membangun sumber modal kerja mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi |
| | | 3 | Membangun sarana prasarana spesifikasi khusus/ spesifik untuk meningkatkan daya saing usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi |
| 37 | Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor | | Fasilitasi infrastruktur untuk pengembangan Koperasi, industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) |
| 38 | Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali | | Pembangunan infrastruktur darat , laut dan udara yang terinteragi dan konektivitas antara kabupaten /kota Provinsi Bali dengan wilayah lain di Indonesia |

| | | | |
|-----------------|---|--|---|
| 39 | Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan publik | Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kab/kota di Provinsi Bali | |
| 40 | Pemberdayaan Krama Bali dan aparaturn pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman | Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali | |
| 41 | Peningkatan koordinasi antara aparaturn pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata | Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan | |
| Strategi | | Arah Kebijakan | |
| 42 | Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali | Masyarakat Madani menjadi tulang punggung kehidupan demokratis, perlakuan hukum yang adil, dan dalam menjalankan hak-hak konstitusi kehidupan Krama Bali | |
| 43 | Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali | Menyelaraskan kesetaraan Gender dalam nilai-nilai budaya Bali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI | |
| 44 | Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali | 1 | Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana untuk kehidupan Krama Bali dan pengembangan ekonomi daerah berprdoman pada tata ruang yang telah ditetapkan |
| | | 2 | Menjadikan Wilayah Bali Timur dan Bali Utara Sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi Baru |
| 45 | Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman | Mengendalikan perilaku Krama Bali dan pengunjung untuk menjaga lingkungan hidup pulau Bali | |
| 46 | Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi Lembaga Pemerintah Daerah | Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan | |
| 47 | Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi | 1 | Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya |
| | | 2 | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah |

2.2 VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Menunjuk pada Visi Misi dan Renstra Provinsi Bali maka terbentuklah Visi Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019-2023.

2.2.1 Visi

Visi Badan Penghubung Provinsi Bali adalah “Terwujudnya kelancaran urusan pemerintahan dan pembangunan daerah Bali di Ibu Kota Jakarta”.

2.2.2 Misi

Misi Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

1. Meningkatkan kelancaran koordinasi hubungan antar lembaga
2. Mewujudkan pelayanan yang profesional untuk peningkatan pendapatan melalui wisma Badan Penghubung Provinsi Bali
3. Mewujudkan promosi dan informasi di bidang ekonomi, sosial budaya, seni dan pariwisata di Jakarta
4. Meningkatkan pengembangan dan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

2.2.3 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :
Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali.
Pelayanan yang dimaksud adalah :

- 1Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga antara Pemerintah Provinsi Kab/kota ke Pemerintah Pusat melalui Badan Penghubung Provinsi Bali
- 2Pelayanan profesional bagi tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali
- 3Pelayanan promosi seni budaya untuk pengunjung Anjungan Bali TMII
- 4Pelayanan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

2.2.3 Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :
Meningkatnya kualitas pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali.

2.3 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan.

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penghubung Provinsi Bali, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan koordinasi antar lembaga/kementerian/ non kementerian dari daerah ke pusat yang terselesaikan dengan baik
- b. Meningkatkan frekuensi promosi informasi tentang kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta
- c. Meningkatkan frekuensi pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
- d. Meningkatkan pelayanan yang optimal kepada tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali.

2. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan 2 program antara lain:

- a. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja
- b. Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah

3. Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan kedua program di atas ada 20 kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- j. Upacara keagamaan
- k. Penyusunan Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
- l. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- m. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- n. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- o. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
- p. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- q. Penyediaan bahan logistik kantor
- r. Pagelaran seni budaya
- s. Pelestarian dan pengembangan adat dan budaya
- t. Penyediaan Barang/Jasa dan kegiatan rutin pimpinan Daerah

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.

IKU Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali, pelayanan yang dimaksud adalah :

- 1 Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga
- 2 Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya
- 3 Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni budaya di Anjungan Daerah Bali di Jakarta
- 4 Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali

2.5 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2019 pada Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai berikut :

TABEL 3
PENETAPAN KINERJA

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|--------|
| Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali | 70 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 EVALUASI KINERJA

Untuk melihat sampai sejauh mana pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dilakukan metode pengukuran kinerja kegiatan. Atas dasar dari hasil-hasil yang diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan, selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja sasaran, melalui indikator-indikator kinerja pencapaian sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam, serta sejauh mana realisasi sasaran dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali dapat terwujud.

TABEL 4

CAPAIAN SASARAN

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

| Indikator Kinerja Utama | Target Renstra | Realisasi s.d Tahun 2019 | Tahun 2019 | | |
|---|----------------|--------------------------|------------|-----------|----------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali : | 90 | 83.92 | 70 | 83.92 | 119,88 % |
| 1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga | | 85.87 | | | |
| 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan masyarakat Bali di Jakarta melalui Badan Penghubung | | 88.13 | | | |
| 3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta | | 92.00 | | | |
| 4. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali | | 69.66 | | | |

Berdasarkan data di atas capaian/realisasi indikator kinerja Tahun 2019 untuk sasaran strategis dapat dicapai dengan baik bahkan melampaui target yaitu dengan persentase capaian 119,88%. Dengan target nilai IKM 70 di Tahun 2019 ternyata penilaian IKM rata-rata pelayanan di Badan Penghubung sudah mencapai 83.92. Nilai IKM paling tinggi dicapai dari pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Provinsi Bali dan terendah dari pelayanan wisma Badan Penghubung Provinsi Bali. Perhitungan IKM sudah sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK.

3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya, karena Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2019 - 2023. Adapun Indikator Renstra Tahun 2014 – 2018 berbeda dengan indikator Renstra 2019 – 2023.

TABEL 5.

PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

| Indikator Kinerja Utama | Target Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2018 | Capaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2019 | Capaian Tahun 2019 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali | - | - | - | 70 | 83.92 | 119.88% |

3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2019 DENGAN TARGET RENSTRA

Untuk perbandingan capaian sasaran strategis tahun berjalan Renstra dalam hal ini yaitu tahun 2019 dengan target Renstra 2019-2023 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

TABEL 6

PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2019 DENGAN TARGET RENSTRA

| Indikator Kinerja Utama | Target Renstra | Realisasi s.d Tahun 2019 | Persentase capaian akhir tahun Renstra |
|--|----------------|--------------------------|--|
| Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali | 90 | 83.92 | 93.24% |

3.5 ASPEK PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Aspek Pendukung :

1. Kuantitas (jumlah) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas, dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali sejumlah 44 orang dengan rincian :

TABEL 7
KUANTITAS SDM

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|-------------------------------|----------|
| 1. | Berdasarkan Pangkat/Golongan: | |
| | - Pembina | 1 orang |
| | - Penata Tk.I/ III d | 3 orang |
| | - Penata/ III c | 3 orang |
| | - Penata Muda Tk.I/ III b | 2 orang |
| | - Penata Muda/ III a | 2 orang |
| | - Pengatur Tk I/ III d | 1 orang |
| | - Pengatur/ III c | 4 orang |
| | - Pengatur Muda Tk.I/ III b | 2 orang |
| | - Juru Tk. I | 2 orang |
| 2. | Berdasarkan Eselon: | |
| | Eselon III a | 1 orang |
| | Eselon IV a | 3 orang |
| 3. | Tenaga Kontrak | 24 orang |

2. Sarana dan prasarana

Untuk menunjang pencapaian target sasaran strategis Badan Penghubung Provinsi Bali telah mempunyai sarana dan prasarana pendukung yang berada di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali di Cikini maupun di Anjungan Daerah Bali TMII sebagai berikut :

1. Gedung wisma dengan kapasitas 14 kamar
2. Ruang Kantor di Cikini dan Anjungan Daerah Bali TMII
3. Aula/auditorium di Cikini
4. Kendaraan roda 4 (mobil) sejumlah 11
5. Kendaraan roda 2 (motor) sejumlah 2
6. Wantilan di anjungan Bali untuk pementasan seni
7. Panggung terbuka untuk pementasan seni
8. Brosur dan pamflet promosi dan informasi kebudayaan Bali

Namun selain aspek pendukung diatas juga terdapat beberapa aspek penghambat dalam pencapaian target sasaran strategis, yaitu :

1. Kualitas (kompetensi) Sumber Daya Manusia

Dari ke-20 PNS yang terdapat di Badan Penghubung Provinsi Bali, 4 (empat) orang diantaranya bekerja di anjungan Bali TMII dibawah Sub Bidang Promosi dan Informasi, 3 (tiga) orang dibawah Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, 5 (lima) di bawah Sub Bidang Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan dan 7 (tujuh) PNS bertugas di Subbag Tata Usaha. Kualifikasi pendidikan dari PNS di Badan Penghubung Provinsi Bali sangat jauh dari harapan dan kebutuhan analisis jabatan dan beban kerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Padahal sangat banyak keahlian yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran yang telah ditentukan OPD. Dari ke-20 PNS di Tahun 2019 hanya 6 (enam) orang yang berpendidikan sampai dengan S-2, 3 (tiga) orang berpendidikan S1 dan yang lainnya dengan tingkat pendidikan setara SMA dan belum meningkatkan kapasitasnya demi kualitas pribadi untuk menunjang kualitas SDM di Badan Penghubung Provinsi Bali. Sesuai dengan Analisis Jabatan diperlukan setidaknya 33 PNS dengan kualifikasi tertentu di Badan Penghubung Provinsi Bali (sesuai peta jabatan terlampir).

2. Anggaran

Secara keseluruhan anggaran sangat berpengaruh terhadap capaian sasaran strategis. Di Tahun 2019 demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ada beberapa hal yang kami laksanakan sesuai dengan anggaran yang diberikan, yaitu :

1. Menganggarkan pembangunan wisma Badan Penghubung Provinsi Bali sesuai dokumen DED. Ini dinilai sudah sangat urgent karena bangunan saat ini sudah tua, tidak bisa hanya mengandalkan pemeliharaan saja tapi harus dibongkar total dan ditambah kamar sesuai kebutuhan pegawai Pemprov Bali dan dibuat sekelas city hotel sehingga mampu menghadirkan kenyamanan lebih baik dan dengan demikian diharapkan mampu menarik pelanggan lebih banyak dan mencapai target pendapatan yang telah ditentukan. Namun penganggaran pembangunan wisma ditangguhkan di tahun 2019 maupun 2020 karena penganggarnya masih akan dikaji/ dianalisis lebih lanjut oleh Bappeda.
2. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pelayanan promosi dan informasi kebudayaan dan pariwisata Bali juga sangat tergantung anggaran karena menyangkut dengan jumlah pagelaran dan pementasan-pementasan seni yang sanggup diselenggarakan oleh anjungan Daerah Bali. Karena dengan pagelaran seni tersebut sangat efektif untuk menarik kunjungan tamu ke anjungan Bali TMII.
3. Untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali di Tahun 2019, kami hanya menyelenggarakan 1 (satu) kegiatan yaitu seminar sarathi Banten karena keterbatasan anggaran. Diharapkan di tahun-tahun mendatang anggaran akan diberikan lebih besar sehingga kami bisa menyelenggarakan pembinaan yang lebih variatif dan bermanfaat bagi masyarakat Bali di Jakarta.

F. REALISASI ANGGARAN

a. Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah Badan Penghubung Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target Rp. 259.800.000,- terealisasi sebesar Rp.124.150.000,- atau 47,79%. Seluruh pendapatan daerah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 dimana targetnya Rp. 259.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 165.350.000,- atau 63,65%. Terjadi penurunan penerimaan PAD sebesar 15.86% hal ini disebabkan selain karena ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas yang menyebutkan

bahwa biaya penginapan diterapkan secara real cost dan ditetapkan besaran yang cukup besar di DPA sehingga banyak PNS lebih memilih penginapan/hotel yang memiliki fasilitas lebih nyaman dibandingkan wisma Badan Penghubung Bali, namun Badan Penghubung tetap berbenah agar tamu merasa nyaman dan aman dengan menampilkan suasana kental Bali yang eksotik di tengah Ibukota Jakarta. Penyebab lain juga adalah sudah tidak ada lagi penerimaan sewa kantin di tahun 2019 tetapi di target masih ada dan permohonan penurunan target di tolak oleh Bapenda. Sewa kantin sudah tidak bisa lagi dipungut karena kantin di Anjungan Daerah Bali sudah dialihfungsikan menjadi etalasi barang-barang kesenian.

TABEL 8.
REALISASI PENDAPATAN

| NO | URAIAN | TARGET ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | |
|----|------------------------|---|----------------|-------|
| | | | Rp | % |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 259.800.000,00 | 124.150.000,00 | 47,79 |

b. Belanja Daerah

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Belanja daerah tahun 2019 dengan target anggaran BTL dan BL setelah perubahan sebesar Rp. 9.278.814.511,- realisasinya sebesar Rp. 8.817.298.030,- atau 95,03%. Bila dibandingkan Tahun 2018 dengan anggaran BTL dan BL sebesar Rp. 9.158.091.869,- realisasinya sebesar Rp. 8.669.598.188,- atau 94,67% penyerapan anggaran Tahun 2019 lebih baik dari Tahun 2018. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagai berikut :

TABEL 9
REALISASI BELANJA DAERAH

| NO | URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | |
|----|------------------------|----------------------------------|------------------|-------|
| | | | Rp | % |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 4.860.185.687,00 | 4.462.855.545,00 | 91,82 |

Dengan rincian perbandingan Belanja Langsung per kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran strategis sebagai berikut :

TABEL 10
REALISASI BELANJA LANGSUNG

| NO. | Kegiatan | TAHUN 2018 | | | TAHUN 2019 | | |
|-----|--|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| 1. | Tersedianya pengiriman jasa surat menyurat | 5.000.000 | 4.993.000 | 99,86 | 5.000.000 | 4.999.840 | 99,99 |
| 2. | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 200.000.000 | 156.788.160 | 78,39 | 165.000.000 | 145.578.508 | 88,23 |
| 3. | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | 277.599.164 | 277.374.501 | 99,92 | 79.000.000 | 77.510.675 | 98,11 |
| 4. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas | 721.351.728 | 704.759.891 | 97,70 | 781.877.068 | 764.635.088 | 97,79 |
| 5. | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 235.552.136 | 235.455.540 | 99,96 | 325.871.280 | 325.871.275 | 99,99 |
| 6. | Penyediaan alat tulis kantor | 25.000.000 | 25.000.000 | 100,00 | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00 |
| 7. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 | 20.000.000 | 19.999.500 | 99,99 |
| 8. | Penyediaan komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
| 9. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan | 5.000.000 | 4.860.300 | 97,21 | 5.000.000 | 4.945.100 | 98,90 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 10. | Penyediaan bahan logistik Kantor | 7.500.000 | 4.447.000 | 59,29 | - | - | - |
| 11. | Penyediaan makanan dan minuman | 180.498.750 | 180.360.000 | 99,92 | 315.500.000 | 315.305.000 | 99,94 |
| 12. | Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar dan dalam daerah | 389.401.000 | 385.098.450 | 98,90 | 424.000.000 | 423.721.344 | 99,93 |
| 13. | Upacara keagamaan | 65.000.000 | 65.000.000 | 100,00 | 75.000.000 | 75.000.000 | 100,00 |
| 14. | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | 450.000.000 | 404.800.000 | 89,96 | 98.500.000 | 94.947.981 | 96,39 |
| 15. | Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor | - | - | - | 216.183.000 | 216.113.500 | 99,97 |
| 17. | Penyusunan perencanaan dan pelaporan capaian kinerja | - | - | - | 5.950.000 | 5.950.000 | 100,00 |
| 18. | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 52.500.000 | 47.305.000 | 90,10 | 94.300.000 | 87.344.000 | 92,62 |
| 19. | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. | 488.788.466 | 476.891.501 | 97,57 | 348.717.732 | 348.422.939 | 99,91 |
| 20. | Pagelaran seni budaya | 573.349.000 | 566.702.250 | 98,84 | 675.500.000 | 675.489.641 | 99,99 |
| 21. | Pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah | 0 | 0 | - | 50.000.000 | 47.963.000 | 95,93 |
| 22. | Penyediaan barang/jasa dan kegiatan rutin pimpinan daerah | 554.525.864 | 547.084.257 | 98,66 | 698.229.744 | 685.645.094 | 98,19 |
| | JUMLAH | 4.596.066.108 | 4.446.791.506 | 96,75 | 4.418.628.824 | 4.354.442.485 | 98,55 |

BAB IV

PENUTUP

Secara umum program kerja Badan Penghubung Provinsi Bali dalam Tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik dengan segala keterbatasan yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Bali. Langkah-langkah konkret yang dilaksanakan di Tahun 2019 untuk lebih memaksimalkan pencapaian kinerja di tahun-tahun mendatang, yaitu :

1. Penambahan kegiatan pagelaran seni dan pembinaan-pembinaan masyarakat Bali di Jakarta sebagai sarana pengembangan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta dengan sasaran meningkatnya kepuasan pengunjung Anjungan Bali TMII dan meningkatnya kepuasan masyarakat Bali di Jakarta atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali.
2. Untuk kendala yang paling mendasar dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Bali adalah keterbatasan kualitas pegawai/sumber daya manusia. Namun saat ini upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM Badan Penghubung Provinsi Bali yaitu dengan lebih intensif mengikuti bimtek-bimtek atau pelatihan maupun workshop yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Bali atau instansi lainnya agar pengetahuan SDM lebih luas dan dapat mendukung pencapaian organisasi.
3. Mengupayakan pembangunan gedung kantor baru sesuai dengan dokumen perencanaan (DED) yang telah ada. Dengan adanya gedung kantor baru maka bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan wisma Badan Penghubung Provinsi Bali.

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2019

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

| PROGRAM | KEGIATAN | | | | REALISASI | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN | KET |
|---|--|---|--------|-------------|-------------|---|-----|
| | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| program peningkatan akuntabilitas capaian kinerja | 1. Penyediaan jasa surat menyurat | Input: Dana | Rupiah | 5.000.000 | 4.999.840 | 100,00 | |
| | | Output: Terlaksananya pengiriman jasa surat menyurat | Bulan | 12 | 12 | 12 | |
| | | Outcome: Terkirimnya Surat menyurat sampai dialamat yang dituju | Bulan | 12 | 12 | 12 | |
| | 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Input: Dana | Rupiah | 165.000.000 | 145.578.508 | 88,23 | |
| | | Output: Terbayarnya biaya telepon dan listrik | Bulan | 12 | 12 | 12 | |
| | | Outcome: Pembayaran penggunaan telepon dan listrik berjalan lancar | Bulan | 12 | 12 | 12 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| | 3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Input: Dana Output: Tersedianya pembayaran iuran dan sumbangan lainnya. Outcome: Pembayaran iuran dan sumbangan lainnya tepat waktu. | Rupiah Bulan Bulan | 79.000.000 12 12 | 77.510.675 12 12 | 98,11 12 12 | |
| | 4. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional | Input : Dana Output : Tersedianya jasa service dan penggantian suku cadang dan perizinan Outcome : Terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas secara optimal. | Rupiah Unit Unit | 781.877.068 12 12 | 764.635.088 12 12 | 97,79 12 12 | |
| | 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor | Input: Dana Output: Tersedianya bahan/ alat kebersihan kantor Tenaga cleaning service Outcome: Terwujudnya kebersihan kantor | Rupiah Jenis Orang Bulan | 325.871.280 24 8 12 | 325.871.280 24 8 12 | 99,96 24 8 12 | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| | 6. Penyediaan alat tulis kantor | Input: Dana Output: Tersedianya sarana alat-alat tulis kantor. Outcome: Terwujudnya alat tulis kantor | Rupiah Bulan Bulan | 15.000.000 12 12 | 15.000.000 12 12 | 100,00 12 12 | |
| | 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Input: Dana Output: Terlaksananya pencetakan blangko Outcome: Terwujudnya pencetakan blangko | Rupiah Bulan Bulan | 20.000.000 12 12 | 19.999.500 12 12 | 100,00 12 12 | |
| | 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Input: Dana Output: Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Outcome: Penerangan kantor menjadi baik | Rupiah Jenis Bulan | 20.000.000 7 12 | 20.000.000 7 12 | 100,00 7 12 | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| | 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Input: Dana Output: Tersedianya surat khabar dan majalah Outcome: Tersedianya sumber informasi untuk menunjang aktivitas kantor | Rupiah Bulan Bulan | 5.000.000 12 12 | 4.945.100 12 12 | 98,90 12 12 | |
| | 10. Penyediaan makanan dan minuman | Input: Dana Output: Tersedianya makanan dan minuman pegawai serta tamu Outcome: Terwujudnya pelayanan makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu | Rupiah Bulan Bulan | 315.500.000 12 12 | 315.305.000 12 12 | 99,94 12 12 | |
| | 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. | Input: Dana Output: Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Outcome: lancarnya pelaksanaan tugas dinas | Rupiah Bulan Bulan | 424.000.000 12 12 | 423.721.344 12 12 | 99,93 12 12 | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| | 12. Upacara keagamaan | Input: Dana Output: Terlaksananya upacara keagamaan sehari-hari Outcome: Tercapainya pelaksanaan upacara keagamaan untuk menunjang aktivitas kantor | Rupiah Bulan Bulan | 75.000.000 12 12 | 75.000.000 12 12 | 100,00 12 12 | |
| | 13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Input : Dana Output : Terselenggaranya Penyediaan barang/jasa dan operasionaln kepala daerah Outcome : Terpenuhi kebutuhan barang/jasa pimpinan | Rupiah Bulan Bulan | 98.500.000 12 12 | 94.947.981 12 12 | 96,39 12 12 | |
| | 14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Input: Dana Output: Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Outcome: Terwujudnya peralatan kantor yang berdaya guna | Rupiah Bulan Bulan | 348.717.732 12 12 | 348.422.939 12 12 | 99,92 12 12 | |
| | 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan | Input : Dana Output : | Rupiah | 94.300.000 | 87.344.000 | 92,62 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
| | gedung kantor | Terlaksananya pemeliharaan Sarana kantor Outcome : Terwujudnya sarana kantor yang terawat | Bulan Bulan | 12 12 | 12 12 | 12 12 | |
| | 16. Penyusunan perencanaan dan pelaporan capaian kinerja | Input : Dana Output : dokumen perencanaan Outcome : dokumen perencanaan | Rupiah Bulan Bulan | 5.590.000 12 12 | 5.590.000 12 12 | 100,10 12 12 | |
| | 17. Perencanaan pembangunan gedung kantor | Input: Dana Output: dokumen studi kelayakan Outcome: dokumen studi kelayakan | Rupiah Bulan Bulan | 216.183.000 12 12 | 216.113.500 12 12 | 99,97 12 12 | |
| program pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi potensi daerah | 18. Pagelaran seni budaya | Input: Dana Output: Terlaksananya pagelaran seni budaya dan pameran makanan Outcome: Terwujudnya pagelaran seni budaya | Rupiah kali kali | 675.500.000 2 2 | 675.489.641 2 2 | 100,00 2 2 | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| | 19. Pelestarian dan pengembangan adat dan budaya | Input: Dana Output: Terlaksananya seminar sarathi banten Outcome: sarathi banten yang memahami keterampilan banten | Rupiah kali kali | 50.000.000 1 1 | 47.963.000 1 1 | 95,93 1 1 | |
| | 20. Penyediaan barang/jasa dan kegiatan rutin pimpinan daerah | Input : Dana Output : Terselenggaranya Penyediaan barang/jasa dan operasionaln kepala daerah Outcome : Terpenuhi kebutuhan barang/jasa pimpinan | Rupiah Bulan Bulan | 698.229.744 12 12 | 685.645.094 12 12 | 98,20 12 12 | |

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2019

SKPD : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

| SASARAN | INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN | TARGET | REALISASI | %PENCAPAIAN TARGET | KET |
|--|--|--------|-----------|--------------------|-----|
| Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali | 70 | 83.92 | 119.88% | |